

Bibliography

- BPKP. 2014. "Pengawasan Keuangan Desa." Accessed on 13 July 2016. Bpkp.go.id
- Cresswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Second Edition*. California: Sage Publications.
- DPR. 2014. "Dana Desa: Alokasi dan Potensi Inefektivitasnya". Accessed on 13 July 2016. Dpr.go.id
- ELSPPAT. 2009. "Sekilas Otonomi Daerah.". Accessed on 13 July 2016. Elsppat.or.id
- Haryanto, Joko Tri. 2015. "Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016. Accessed on 13 July 2016. Kemenkeu.go.id
- Joeliono. 2015. "Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penguatan Otonomi Desa." *Pemerintah Kabupaten Banyumas*. Accessed on 13 July 2016. banyumaskab.go.id
- Litvack, Jennie. 1997. "What is Decentralization". Accessed on 13 July 2016. Ciesin.org/decentralization
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mathiason, J, 2012. *The imperatives of empowerment, Concept Note for the Expert Group Meeting on the Priority Theme of the Commission for Social Development 2013-2014*, Presented in 5 August, 2012
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang
*Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara*

Setkab. 2015. “Jadi Rp46.9 Triliun, Pemerintah Naikkan Alokasi Dana Desa 100%
Lebih.” Accessed on 13 July 2016. [Setkab.go.id](http://setkab.go.id)

Solekhan, M, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat*. Malang: Setara Press

Suryaningrat, M. 2014. “Otonomi Desa dan Alokasi Dana Desa”. Accessed on 13
July 2016. [Desabalekambang.go.id](http://desabalekambang.go.id)

Suryanto. 2014. “Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah
ke Desa.” Accessed on 13 July 2016. [Bpkad.natunakab.go.id](http://bpkad.natunakab.go.id)

United Nation Development Program, 1997. “Dokumen Prinsip-Prinsip Good
Governance,” Jakarta: PT. Sinar Abadi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN*



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**THE ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND (CASE
STUDY: WONOGIRI VILLAGE
KAJORAN DISTRICT AND KEJI VILLAGE MUNTILAN DISTRICT MAGELANG REGENCY IN 2015)**

KEMAS DESTIA, Drs. Haryono M.Com., Ak., CA

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>